

ABSTRAK

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki signifikan besar bagi negara. Hal ini guna mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah pusat menetapkan peraturan dalam ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengenai persoalan dana desa yang masih terus ada tindakan penyelewengan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana desa dan menganalisis bagaimana upaya hukum atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan program dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus kemudian dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sah harus melalui tahap direncanakan, dilaksanakan, dipenatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya preventif dan upaya represif bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan penyimpangan dana desa. Oleh karena, perlu adanya sinkronisasi/penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi terkait pengelolaan dana desa dan meningkatkan pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana desa dari Kemendes, PDTT, dan DJPK.

Kata kunci: Desa – Pengelolaan - Dana Desa

ABSTRACT

The village is the smallest unit in the Indonesian constitutional system which has great significance for the country. In order to realize national development, the central government has established regulations in the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Regarding the issue of village funds, there are still acts of fraud committed individually and in groups. Therefore, this research was conducted to determine the suitability of statutory regulations regarding village fund management and to analyze legal remedies for irregularities that occur in the implementation of village fund programs. The research method used is normative juridical. The approach taken is a case approach which is then analyzed using a statutory approach and a conceptual approach. Therefore, there is a need to synchronize/arrange regulations, develop human resources, and digitalize related to village fund management and increase supervision, assistance, and outreach regarding technical village fund management from the Ministry of Village, PDTT, and DJPK.

Keywords: Village - Management - Village Funds